

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Keunikan tersebut dilihat dalam realitas kemajemukan dan persatuan yang erat di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Berbagai pelosok yang termaktub dalam wilayah negara Indonesia, menyimpan berbagai potensi yang mencirikan keunikan negara Indonesia. Salah satu keunikan Indonesia yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain ialah kekayaan ras, suku, budaya, bahasa, serta keyakinan.

Berbagai variasi kekayaan tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terindah di dunia. Selain diselimuti dengan kekayaan budaya negara Indonesia juga memiliki warisan alam yang sangat kaya. Kekayaan alam Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Kekayaan alam yang terbentang hampir di seluruh pelosok bumi Indonesia tersebut menuntut sebuah upaya pemeliharaan dan pelestarian yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia itu sendiri diberi tugas untuk merawat, menjaga dan melestarikan semua kekayaan yang terberi itu. Mengenai keanekaragaman ini, para pendiri bangsa sudah terlebih dahulu memikirkan bagaimana caranya untuk hidup dalam perbedaan suku, agama, ras, budaya dan lain sebagainya sembari menjaga nilai dari perbedaan-perbedaan tersebut.

Soekarno dan Mohammad Hatta serta para Pendiri Bangsa Indonesia lainnya selalu berusaha mempertahankan pluralitas di Indonesia, dengan menjunjung tinggi setiap nilai yang terkandung dalam setiap budaya di Indonesia. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka (*founding fathers*) berhasil menyusun gagasan yang menjadi landasan dasar dan pandangan hidup berkebangsaan Indonesia bertolak dari realitas kemajemukan di Indonesia. Landasan dasar tersebut adalah Pancasila. Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan pengarah kehidupan yang mengandung kaidah-kaidah dalam mengatur perjalanan kehidupan bangsa Indonesia yang plural.

Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai fundamental yang digali para pendiri bangsa Indonesia khususnya Soekarno dari kebudayaan nasional Indonesia, sejarah pergerakan perjuangan bangsa yang dijadikan sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam Mukadimah UUD 1945.<sup>1</sup> Pancasila mempertimbangkan situasi pluralitas di Indonesia dari berbagai dimensi kehidupan dengan meninjau berbagai macam aspek, sehingga mewujudkan basis yang kokoh tanpa adanya ketidakadilan, yang berpotensi menghancurkan kesatuan negara Indonesia. Pancasila merupakan sebuah gagasan yang reflektif Soekarno atas nasib nenek moyang bangsa Indonesia yang mengalami penderitaan karena penjajahan dan hidup di bawah tekanan imperialisme.

Atas dasar kesamaan nasib ini, Soekarno dan para pendiri bangsa Indonesia telah mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Salah satu pertimbangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dari Soekarno adalah bahwa Pancasila merupakan satu *Weltanschauung* (pandangan dunia), satu falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu alat pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ia bukan hanya merupakan alat pemersatu negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakikatnya merupakan satu alat pemersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit berpuluh-puluh tahun yaitu imperialisme.<sup>2</sup>

Selain itu, para pendiri juga telah mempertimbangkan secara matang akan kekayaan alam di Indonesia yang mampu memberikan kehidupan kepada generasi bangsa Indonesia yang akan datang. Kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tidak hanya menjamin kehidupan generasi bangsa, tetapi lebih dari itu kekayaan alam Indonesia juga menyimpan berbagai keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri. Alam yang kaya itu menjadi salah satu alasan bagi bangsa asing untuk melakukan perniagaan di Indonesia. Namun, kekayaan alam tersebut adalah milik bersama warga bangsa Indonesia, sehingga kekayaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa Indonesia.

---

<sup>1</sup> Silvano Keo Bhaghi, “*Negara Bukan-Bukan?*” (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 88.

<sup>2</sup> Soekarno (1958), dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.1.

Hal ini berarti, segala bentuk kekayaan alam dikelola atau digunakan hanya untuk kebutuhan dan kepentingan bersama semua warga negara Indonesia. Semua kekayaan alam yang ada di Indonesia diolah dan digunakan secara bersama, tanpa adanya dominasi serta perlakuan yang tidak adil. Ringkasnya, kekayaan alam yang dimiliki bersama digunakan untuk kepentingan bersama.

Kehadiran bangsa asing di Indonesia membawa serta watak dan karakteristik serta ideologinya sendiri. Sesuai dengan letaknya yang strategis, Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan tempat peleburan budaya-budaya asing serta sebagai tempat pembentukan budi pekerti. Bangsa-bangsa asing tersebut adalah orang Hindi, orang Arab, orang Tionghoa dan masih banyak lainnya. Bangsa-bangsa asing tersebut mengasah budi pekertinya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai tuan rumah yang ramah.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan yang pluralitas, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ketidak-adilan, diskriminasi, budaya dominasi, intoleransi dan lain sebagainya. Hal seperti ini, tentunya akan mendatangkan malapetaka serta kehancuran. Kehancuran bisa juga terjadi, apabila seluruh elemen bangsa Indonesia tidak benar-benar hidup sesuai dengan ideologi bangsa yakni Pancasila. Hal ini disebabkan oleh pengadopsian sistem ekonomi global yakni kapitalisme neoliberal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembiaran budaya-budaya asing merupakan sebuah pengkhianatan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Pembiaran sistem asing oleh pemerintah Indonesia berimplikasi pada pelanggaran Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Indonesia. Pembiaran budaya asing yang mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat merusak tatanan nilai-nilai kehidupan dan membuat tidak terwujudnya cita-cita bersama bangsa Indonesia.

Selain sebagai ideologi, Pancasila telah telah menerobos jauh menembusi titik perjuangan melawan kolonialisme. Hal ini merupakan sebuah tinjauan yang begitu kaya akan makna Pancasila. Selain itu, bentuk konkrit dari Pancasila yang

---

<sup>3</sup> Mohammad Hatta dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, *op. cit.*, hlm. 3.

diejahwantahkan sila Pancasila yakni paham kedaulatan rakyat. Negara Indonesia juga membentuk suatu sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, yakni demokrasi. Paham demokrasi menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Setelah merdeka dari penjajahan Belanda, bangsa Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem tata pengelolaan negara untuk mencapai cita-citanya sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila. Mengenai demokrasi Indonesia, Muhammad Najib menyatakan bahwa paham kedaulatan rakyat secara implisit menegaskan sistem kekuasaan yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu bukan kerajaan, bukan pula kesultanan, melainkan demokrasi.<sup>4</sup> Selain itu, demokrasi juga menggambarkan kepribadian serta jati diri bangsa Indonesia.

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila secara implisit menegaskan bahwa negara Indonesia tidak perlu lagi mengadopsi sistem asing, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Mengadopsi sebuah sistem asing merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap nilai perjuangan luhur para pendiri bangsa ini, serta penghinaan terhadap Pancasila.

Sehubungan dengan hal di atas, belakangan ini negara Indonesia telah menampilkan kehidupan berbangsa yang tidak sesuai dengan Pancasila. Realitas kehidupan bangsa Indonesia semakin jauh dari tujuan dan cita-cita bersama. Tanpa disadari, seluruh elemen bangsa Indonesia menjadi lemah. Salah satu penyebab utamanya ialah pengadopsian sebuah sistem ekonomi asing yang sepatutnya tidak diterapkan ke dalam kehidupan di Indonesia. Mentalitas warga negara Indonesia yang pada hakikatnya adalah mentalitas pejuang, kini berbelok menghadap budaya kebarat-baratan yang dapat merusak kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu sistem asing yang mematikan keberlanjutan usia ideologi Pancasila yakni kapitalisme neoliberal.

Kapitalisme neoliberal merupakan sebuah sistem ekonomi barat, yang saat ini telah diadopsi pemerintah negara Indonesia. Sistem ekonomi ini tidak hanya merongrong perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi kapitalisme neoliberal juga telah berhasil menguasai bidang perpolitikan dan kehidupan sosial negara Indonesia. Sistem ekonomi neoliberal bergerak bagaikan bus yang melemahkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Najib, *Jalan Demokrasi* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 21.

kehidupan bangsa Indonesia. Sistem ekonomi asing ini menyerang bagian-bagian penting kenegaraan seperti pemerintah, dan bahkan warga negara, melalui cara yang hampir tidak kelihatan. Tanpa disadari sistem ekonomi kapitalisme neoliberal dapat menimbulkan krisis bahkan sampai ke seluruh elemen kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan berbagai tipuan dan kelicikan, sistem ekonomi kapitalisme neoliberal berhasil masuk ke dalam tata pemerintahan, dan berhasil mengatur sistem pemerintahan. Hal ini tidak disadari oleh banyak orang. Kekuasaan para kapitalis dalam bidang pemerintahan Indonesia telah berusaha menghidupi ideologi kapitalisme neoliberal. Sehingga hal ini menyebabkan kematian ideologi Pancasila. Pengaruh kekuasaan para elit kapitalisme neoliberal yang membawa ideologi pasar bebas secara perlahan menyingkirkan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Mengenai hal ini, Alexander Jebadu menandakan bahwa tanpa disadari banyak orang, termasuk Bupati, Gubernur dan DPRD di Indonesia pada umumnya, ideologi yang sedang mengemudi tatanan politik dan ekonomi dunia saat ini adalah kapitalisme neoliberal.<sup>5</sup>

Ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia dan sistem perpolitikan di Indonesia saat ini dikuasai oleh para kapitalis. Realitas kapitalisme neoliberal yang telah berhasil masuk ke dalam tata pemerintahan tersebut secara langsung tahap demi tahap menghancurkan nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Wujud konkrit dari implementasi sistem kapitalisme neoliberal oleh para kapitalis yakni menjamurnya berbagai perusahaan asing di Indonesia.

Rakyat Indonesia merupakan elemen negara yang paling menderita, ketika para pemerintah dan para politisi Indonesia melanggengkan sistem ekonomi kapitalis dalam roda pemerintahan dan pencaturan politik. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi. Kapitalisme neoliberal menciptakan jurang yang lebar antara yang kaya dengan yang miskin, baik itu antar kelompok di dalam suatu negara maupun antar negara dengan negara. Realitas peradaban bangsa Indonesia dengan kenyataan gap yang memisahkan orang-orang kaya dan miskin semakin

---

<sup>5</sup> Alexander Jebadu, *Dalam Moncong Neoliberalisme-Kritik Kenabian Terhadap Penyelewengan Pembangunan dengan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Era Otonomi Daerah di Indonesia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm.135.

dirasakan. Kenyataan ini memberikan efek yang meresahkan dan menghancurkan warga bangsa Indonesia itu sendiri secara perlahan.

Selain itu, cita-cita keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dipertanyakan. Hadirnya kapitalisme neoliberal merupakan sebuah awal kehancuran dan penderitaan dalam jangka waktu yang lama. Ideologi ekonomi kapitalis neoliberal sekarang ini diterapkan pada negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Kapitalisme neoliberal juga menjadi alat penjajah yang menyebabkan adanya krisis, Salah satunya ialah krisis ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Alexander Jebadu, krisis ekonomi telah menghantam negara-negara berkembang di asia tenggara, termasuk Indonesia, akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis neoliberal secara paksa, dan dampaknya masih terasa hingga hari ini.<sup>6</sup> Penerapan sistem kapitalis neoliberal di Indonesia telah mempengaruhi kehidupan rakyat yang tersebar hampir di semua pelosok. Pengaruh kapitalisme yang bergerak melalui perusahaan-perusahaan asing secara perlahan membunuh warga masyarakat Indonesia, serta melumpuhkan masa depan anak bangsa.

Selain itu, para elit kapitalis yang telah berhasil menduduki roda pemerintahan mulai membangun kerja sama dengan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yakni pemerintah dan elit kapitalis. Mengenai hal ini, sebagaimana diungkapkan oleh Alexander Jebadu, perusahaan-perusahaan asing yang telah berhasil mendominasi sektor politik ekonomi dapat menulis undang-undang tertentu yang memengaruhi dan mendukung kepentingan mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut berjuang mati-matian melawan setiap usaha pemerintah negara untuk menciptakan undang-undang yang mengatur dan mengendalikan kegiatan bisnis mereka.<sup>7</sup>

Kebijakan-kebijakan yang dibangun, tentunya berorientasi pada kestabilan kehidupan perusahaan-perusahaan, serta upaya pemeliharaan ideologi yang menjiwai sistem ekonomi mereka, yakni kapitalisme neoliberal. Bahkan, aturan-aturan yang dikeluarkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya dijaga dan dilindungi. Setelah berhasil menguasai para pemerintah, para

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Alexander Jebadu, *Drakula abad 21: Membongkar Kejahatan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba Dan Ancamannya Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2021), Hlm. 39.

kapitalis bisa berbuat apa saja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa memikirkan kehidupan rakyat yang susah. Sehingga keadilan diwujudkan yakni keadilan yang berpihak pada para kapitalis dan kelompok pemerintah.

Kapitalisme neoliberal dengan karakter yang demikian, perlu menjadi pertimbangan terlebih pemerintah untuk mengatasi segala persoalan seperti kehancuran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hadirnya kapitalisme neoliberal di Indonesia menghilangkan nilai luhur Pancasila yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Mengenai hal ini, Soekarno, seperti yang dikutip oleh Yudi Latif menyatakan, jikalau kita betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip kesejahteraan sosial, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.<sup>8</sup> Tekad yang mulia dari soekarno ini terwujud juga ketika ia menolak pinjaman luar negeri yang ditawarkan oleh mantan penguasa kolonial.<sup>9</sup> Perampasan hak-hak rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh para kapitalis melalui para eksekutor mereka di tengah kehidupan bangsa Indonesia, pada dasarnya telah melanggar pancasila sebagai ideologi bangsa.

Salah satu wujud nyata kehadiran kapitalisme neoliberal adalah perusahaan-perusahaan yang eksis cukup lama di Indonesia. Salah satu contoh adalah PT Freeport di Mimika, Papua Barat. Kapitalisme di Indonesia pada umumnya mulai secara resmi pada tahun 1967, di mana satu tahun setelah berakhirnya masa pemerintahan Soekarno, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat izin untuk pertama kalinya kepada perusahaan itu.<sup>10</sup> Perusahaan tambang tembaga dan emas di Papua tersebut sangat mencirikan ketamakan para kapitalis. Perusahaan yang telah bekerja sama dengan pemerintah di masa Orde Baru, ternyata tidak memberikan apa-apa kepada rakyat Indonesia pada umumnya dan warga Papua khususnya. Yang ada hanyalah terjadinya praktik eksploitasi oleh perusahaan

---

<sup>8</sup> Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, *op. cit.*, Hlm. 607.

<sup>9</sup> Alexander Jabadu, *Dalam Moncong Neoliberalisme*, *op.cit.*, Hlm.120.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 121.

asing, yakni Amerika Serikat, yang bekerja sama dengan pemerintah, sejak masa Orde Baru.<sup>11</sup>

Eksplorasi yang dilakukan para elit kapitalis tersebut tentu hanya menguntungkan mereka serentak merugikan warga masyarakat Indonesia. Kekayaan alam tersebut merupakan bagian dari kekayaan Indonesia yang sudah sepatutnya dinikmati bersama oleh semua warga negara Indonesia. Namun ironisnya, para kapitalis yang datang menggali kekayaan di bumi Indonesia tidak mempunyai perasaan malu dengan tidak memberikan apa-apa kepada rakyat Indonesia, bahkan hanya meninggalkan kemiskinan yang harus ditanggung oleh warga masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi.

Sistem ekonomi kapitalis neoliberal sangat berpengaruh terhadap kemerosotan nilai Pancasila, yakni keadilan sosial. Fakta ini digambarkan oleh adanya kesenjangan antara segelintir orang yang super kaya dan mayoritas kaum miskin. Realitas yang tampak di negara Indonesia ini merupakan sebuah bentuk penjajahan baru yang dilakukan oleh para elit kapitalis. Dalam penjajahan baru ini, para elit kapitalisme tidak harus mempersiapkan senjata terlebih dahulu untuk merampok atau memeras, sebagaimana yang dilakukan oleh para perampok pada umumnya. Penjajahan tersebut dilakukan hampir tidak disadari oleh masyarakat Indonesia.

Praktik yang dilakukan oleh para elit kapitalisme neoliberal pada umumnya sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Rezim Ekonomi Neoliberal sesungguhnya menghancurkan peradaban manusia (*human civilization*), martabat manusia (*the dignity of human person*), lingkungan hidup sebagai tempat manusia bergantung secara mutlak (*environment*), pemerintahan kerakyatan (*demokrasi*) dan kedaulatan negara (*state sovereignty*).<sup>12</sup>

Kapitalisme neoliberal juga tidak tanggung-tanggung melancarkan aksi dengan melanggar aturan atau hukum sekalipun. Kejahatan kapitalis hadir dalam berbagai bentuk seperti perusahaan-perusahaan yang cenderung berlaku tidak jujur. Ketika melihat kemungkinan untuk mendulang laba yang besar, para kapitalis tidak akan ragu-ragu untuk mulai memburunya bahkan dengan melanggar aturan hukum

---

<sup>11</sup> Brigitta Winasis, 14 juni 2021, "Mengenal Kapitalisme" dalam <https://www.modalrakyat.id/blog/apa-itu-kapitalisme>, diakses pada 26 agustus 2022.

<sup>12</sup> Alexander Jebadu dalam kata pengantar pada buku *Drakula Abad 21*, *op. cit.*, Hlm. Vi.

sekalipun.<sup>13</sup> Ada beberapa kejahatan kapitalis yang hadir dalam bentuk korporasi sebagaimana yang diuraikan oleh Alexander Jebadu bahwa para elit kapitalisme tidak memiliki hati untuk orang miskin sampai pada tindakan pelumpuhan ideologi negara yang nyata dan dialami oleh negara Indonesia sekarang ini.<sup>14</sup>

Hal ini sama dengan kehidupan bangsa diserahkan ke tangan kaum kapitalis. Keberhasilan kaum kapitalis dalam menembusi zona kedaulatan bangsa Indonesia akan membawa negara Indonesia sesuai kemauan para kapitalis. Max Regus menggambarkan sebuah negara yang dipimpin oleh kapitalis selalu diidentikkan dengan ketamakan radikal.<sup>15</sup> Ketamakan radikal kapitalis merupakan akibat pengejaran laba yang tak pernah kenal lelah dengan tindakan yang serakah. Masyarakat miskin merupakan korban dari ketamakan radikal kaum kapitalis.

Tak disadari bahwa negara Indonesia terlalu terbebani oleh perilaku keji para kapitalis yang telah melumpuhkan masa depan bangsa Indonesia. Kaum kapitalis mendistorsi prinsip-prinsip fundamental seperti kesetaraan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penguasaan kaum elit kapitalis neoliberal dalam sektor pemerintahan dapat memicu regulasi yang bersifat pro korporasi yang serentak mengabaikan rakyat Indonesia. Sehingga hal ini membuat rakyat semakin miskin.

Indonesia sebagai negara yang telah dikuasai oleh segelintir kaum elit, mengesampingkan kebebasan masyarakat dan semua elemen yang ada di dalamnya. Rezim kapitalisme neoliberal secara perlahan mengikis institusi kebebasan demokrasi politik, karena kebebasan massa akan dibatasi demi kebebasan segelintir orang kaya.<sup>16</sup> Sistem kapitalisme neoliberal mempunyai preferensi yang kuat yakni pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif yang dikooptasi sedemikian rupa bisa tercapainya deregulasi demi keberlangsungan hidup korporasi.<sup>17</sup>

Pemerintah yang mudah termobilisasi sangat mempengaruhi seluruh keteraturan eksekutif, yakni pengadaan regulasi oleh para elit, demi keuntungan

---

<sup>13</sup> Alexander Jebadu, *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Max Regus, *Demokrasi Profetik-Catatan Atas Dusta Politik dan Ranjau Kekuasaan* (Jakarta: Parrhesia Institute, 2009), Hlm. 117.

<sup>16</sup> Arifin Muhammad, "Neoliberalisme: Genealogi Konseptual, Relevansi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Sosial Modern" *Jurnal Sosio Informa* Vol. 2, No. 03, September-Desember 2016, Hlm. 203.

<sup>17</sup> *Ibid.*

korporasi. Hal ini menunjukkan kontrasnya pengaruh kapitalisme neoliberal, terhadap ideologi negara Indonesia. Melihat realitas miris ini, Budi Hardiman menyatakan bahwa rakyat seharusnya berdaulat. Ia seharusnya memerintah diri sendiri tanpa harus menyerahkan kekuasaannya kepada instansi lain mana pun.<sup>18</sup>

Sebagai warga negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, warga negara Indonesia tentu merasa sangat kecewa apabila nilai-nilai Pancasila justru dilanggar oleh pemerintah. Salah satu nilai penting dalam Pancasila yang mulai bergeser yakni kedaulatan rakyat. Kapitalisme neoliberal yang berkembang semarak di Indonesia secara perlahan menggantikan paham kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan kaum elit kapitalis. Hal ini pada akhirnya menjadi habituasi yang berpimplikasi langsung pada kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa tamak dan serakah, apabila semakin dikuasai oleh para elit kapitalisme neoliberal. Rakyat menjadi salah satu korban yang selalu siap diterkam, ditindas, bahkan dibunuh sekalipun. Kehidupan bangsa Indonesia yang demikian akan terus berlanjut apabila tidak ada kesadaran akan pengaruh-pengaruh yang riil dalam kehidupan sekarang ini.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, saya berikhtiar mendalami pengaruh sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini, di bawah tema “**SISTEM EKONOMI KAPITALIS NEOLIBERAL TERHADAP PENERAPAN SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DARI PANCASILA**”. Selain itu, saya juga berikhtiar menggali nilai-nilai Pancasila yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, secara khusus nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

### **1.2.1 Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang ditemukan penulis dalam karya tulis adalah bagaimana hegemoni kapitalisme neoliberal

---

<sup>18</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang 'Negara Hukum' Dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), Hlm. 125.

mempengaruhi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia seturut Sila Kelima dari Pancasila?

### **1.2.2 Masalah Turunan**

Dari masalah pokok di atas, dapat ditarik beberapa masalah turunannya sebagai berikut:

1. Apa itu kapitalisme neoliberal?
2. Apa pengaruh kapitalisme neoliberal terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
3. Apa itu keadilan sosial?

### **1.3 TUJUAN PENULISAN**

Dalam karya tulis ilmiah ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis yakni, tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Karya tulis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana filsafat, pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Tulisan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar tersebut.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum di atas, adapun tujuan khusus penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempresentasikan bagaimana hegemoni kapitalisme neoliberal terhadap Pancasila, khususnya penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Untuk memberikan pemahaman umum mengenai apa itu kapitalisme neoliberal.
3. Untuk memberi gambaran tentang ciri, karakteristik dan dampak dari sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, yang belakangan ini menguasai Indonesia.

#### **1.4 MANFAAT PENULISAN**

Selain tujuan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, karya ilmiah ini memberikan beberapa manfaat. *Pertama*, karya tulis ini membantu penulis dalam menambah wawasan bagi penulis sendiri. Dalam proses penulisan karya ilmiah ini, penulis menemukan banyak hal-hal baru yang termuat dalam berbagai sumber referensi, baik dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan media online, yang sangat membantu dalam menambah wawasan keilmuan bagi penulis. *Kedua*, karya tulis ini, juga bisa menjadi wawasan tambahan bagi khalayak pembaca, secara khusus mengenai tema kapitalisme neoliberal.

#### **1.5 METODE PENULISAN**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berinisiatif menggunakan metode kajian pendekatan kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Dalam metode ini, penulis berusaha mencari informasi dari berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, majalah, surat kabar, literatur, dan media sosial yang berkaitan erat dengan tema yang digeluti penulis.

#### **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembaca sekaligus membantu penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini dengan baik, penulis membagi tulisan ini ke dalam beberapa bab. Secara keseluruhan tulisan ini dibagi ke dalam lima bab, dengan perinciannya sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan yang terdiri atas dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II memaparkan tema tentang apa itu kapitalisme neoliberal dan bagaimana kapitalisme telah berhasil menembusi zona integritas bangsa dan menghalangi negara untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab III memaparkan tentang nilai Pancasila secara khusus Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab IV memaparkan korelasi antara Bab II dan Bab III. Bab ini menghubungkan apa yang menjadi inti dari karya ilmiah ini, serta memaparkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini.

Bab V merupakan bab terakhir. Bab ini berisi kesimpulan dan usul saran dari karya ilmiah ini. Saran yang penulis usulkan melalui tulisan ini adalah tolak kapitalisme neoliberal dan bangun semangat gatong-royong yang berdasarkan Pancasila.